

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan globalisasi telah membuka pintu kemudahan dalam sejumlah aspek seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Perkembangan ini tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap setiap lapisan manusia bahkan bagi suatu negara, baik memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang muncul sebagai konsekuensi dari globalisasi adalah meningkatnya tindak kriminal yang melewati lintas batas negara. Hal tersebut dikenal juga dengan istilah kejahatan transnasional (*transnational crime*). Salah satu wujud konkret dari kejahatan transnasional yang terus berkembang adalah perdagangan manusia yang timbul karena peningkatan mobilitas penduduk antar negara (Bélanger & Linh, 2011).

Permasalahan perdagangan manusia merupakan isu yang telah lama ada, namun kurang mendapat perhatian dari masyarakat, sehingga seringkali terabaikan. Padahal dalam praktiknya, isu ini telah menjadi permasalahan sosial yang sangat serius dan mengkhawatirkan banyak orang. Perdagangan manusia secara luas dianggap sebagai fenomena perbudakan modern yang semakin meningkat skalanya dan jangkauannya secara global. Fenomena perdagangan manusia ini terjadi hampir di seluruh dunia sebagai kejahatan lintas batas negara yang berkembang dengan cepat. Korban dari perdagangan manusia sendiri dapat terjadi terhadap laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak dari berbagai latar

belakang dan usia. Perdagangan manusia menjadi salah satu masalah global yang mengancam pertumbuhan manusia dan pembangunan ekonomi, adanya hubungan yang kuat antara praktik migrasi dan kelompok kriminal yang terlibat dalam perdagangan manusia.

Perdagangan manusia dapat terjadi dalam berbagai jenis, seperti perdagangan manusia untuk industri seks (*sex trafficking*) yang bertujuan untuk seks komersial mulai dari prostitusi, pornografi, dan pariwisata sex, perdagangan manusia untuk perburuhan (*labour trafficking*) yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja murah, bahkan ada pula jenis perdagangan manusia yang berbentuk pernikahan yakni sering dikenal dengan istilah *bride trafficking* (perdagangan pengantin) (Huma, 2023). *Bride trafficking* (perdagangan pengantin) merupakan suatu fenomena kejahatan terorganisir di mana sasaran yang diperdagangkan adalah perempuan untuk menjadi bahan eksploitasi seperti pelecehan, pemerkosaan, dan bentuk eksploitasi lainnya.

Menurut laporan dari UNODC, pernikahan dapat dianggap sebagai bentuk perdagangan manusia ketika melibatkan unsur pemaksaan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penipuan untuk mendapatkan persetujuan korban agar menjadi pengantin (UNODC, 2021). Metode-metode ini kemudian digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membawa korban *bride trafficking* ke pembeli, yang pada akhirnya akan mengarah pada praktik jual-beli dan eksploitasi. Mayoritas korban *bride trafficking* adalah perempuan yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah atau miskin yang dijanjikan oleh *trafficker* dengan pekerjaan berupah tinggi demi kehidupan yang lebih baik .

Tiongkok menjadi salah satu negara dengan tingkat *bride trafficking* tertinggi, apalagi semenjak diterapkannya kebijakan *one-child policy* di Tiongkok yang telah berlangsung sejak lama. Di mana kebijakan ini mengharuskan setiap keluarga di Tiongkok hanya boleh memiliki satu anak saja. Hal ini diakibatkan pula oleh tingginya populasi penduduk Tiongkok yang melampaui lebih dari satu miliar jiwa, sehingga menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam pertumbuhan perekonomian di Tiongkok (Pazli & Purwasandi, 2013). Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 1979 ini, lantas mengakibatkan adanya preferensi dari setiap keluarga untuk lebih memiliki anak laki-laki ketimbang anak perempuan.

Hal tersebut tentu didukung oleh beberapa alasan, sebagaimana stigma yang sudah tertanam dalam budaya masyarakat Tiongkok bahwasanya anak perempuan dinilai kurang ekonomis karena anak perempuan pada hakikatnya hanya dapat melakukan pekerjaan rumah saja (Cahyaningsih, 2018). Sementara anak laki-laki dianggap mampu menjadi investasi yang baik di masa depan, yang dapat menanggung biaya hidup orang tuanya, mampu meneruskan marga, dan banyak faktor lain yang menjadi alasan mengapa orang tua di Tiongkok lebih memiliki anak laki-laki ketimbang anak perempuan (Cahyaningsih, 2018).

Implementasi tersebut yang pada awalnya bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, justru menyebabkan adanya ketidakseimbangan rasio antara pria dan wanita yang cukup tinggi. Ketidaksimbangan tersebut lantas menimbulkan kesulitan yang dihadapi oleh banyak pria di Tiongkok untuk mencari pasangan hidup, dikarenakan wanita di Tiongkok cenderung memilih

pasangan yang memiliki status sosial yang tinggi untuk memastikan kehidupan yang terjamin di masa depan. Di Tiongkok, ketidakseimbangan gender antara laki-laki dan perempuan tersebut justru memberikan keuntungan bagi perempuan dengan memberikan mereka kebebasan dalam memilih pasangan hidup. Selain itu, perempuan beserta keluarga mereka menargetkan mahar yang tinggi. Meski nilai mahar yang diinginkan semakin meningkat, hal ini tidak menjadi hambatan bagi pria Tiongkok yang berasal dari status sosial keluarga yang berkecukupan, memiliki pekerjaan tetap, dan pendapatan yang substansial (Kaiman, 2013).

Namun di sisi lain, 40-50 juta pria Tiongkok dengan status sosial yang rendah yang menghadapi tantangan ekonomi juga mengalami kesulitan dalam mengorganisir suatu pernikahan. Selain karena tekanan finansial dari pihak perempuan, banyak pria juga merasakan adanya tekanan yang dimunculkan dari keluarga mereka. Keluarga yang terus mendorong mereka untuk segera menemukan pasangan hidup dan menikah untuk menghindari status *guanggun*, suatu istilah dalam budaya Tiongkok yang merujuk pada laki-laki tanpa istri atau keturunan yang diibaratkan sebagai ranting tanpa pohon, atau dalam artian lain mencerminkan ketidakmampuan seorang laki-laki untuk melanjutkan garis keturunan keluarga (Quanbao et al., 2011).

Berada dalam situasi di mana belum menemukan pasangan disaat usia semakin bertambah, terutama desakan dan tuntutan dari keluarga untuk segera menikah justru menciptakan keterkaitan yang kuat dengan meningkatnya tindak kejahatan. Hal tersebut lantas menjadi sasaran oleh banyak kelompok kejahatan transnasional sebagai kesempatan bisnis untuk menjual wanita dari beberapa

negara tetangga, termasuk negara-negara *Greater Mekong Sub-region* (GMS) yang meliputi negara Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Myanmar. Namun, permasalahan perdagangan pesanan wanita untuk pernikahan dengan jumlah korban terbesar terhitung sampai tahun 2021 terdapat lebih dari 3.000 orang berasal dari Vietnam dan memungkinkan lebih besar dari pada itu sebab banyak korban yang tidak terdeteksi akibat dari taktik penyelundupan (U.S. Department of State, 2023).

Ada beberapa alasan mengapa pria Tiongkok lebih memilih perempuan dari Vietnam dibandingkan dengan perempuan dari negara-negara *Greater Mekong Sub-region* (GMS) lainnya. Pertama, alasan tersebut terkait dengan kesamaan etnis antara perempuan Vietnam dan bangsa Han Tiongkok (Situmeang, 2020). Baik Vietnam maupun Tiongkok memiliki latar belakang sejarah yang kuat dan pengaruh budaya yang mendalam, yang menciptakan rasa persamaan etnis di antara mereka. Ini menciptakan hubungan yang lebih kuat dan mudah diintegrasikan dalam konteks pernikahan dan kehidupan keluarga. Kecocokan budaya juga berperan dalam memudahkan komunikasi dan interaksi.

Selanjutnya, alasan kedua adalah harga perempuan Vietnam yang lebih terjangkau dibandingkan dengan perempuan dari negara-negara GMS lainnya (Situmeang, 2020). Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi seperti tingkat penghasilan yang rendah di Vietnam, yang membuat keluarga di negara ini lebih menerima pembayaran yang lebih rendah sehingga menjadikan perempuan Vietnam sebagai pilihan yang lebih hemat biaya bagi pria Tiongkok yang mencari pasangan.

Alasan ketiga adalah bahwa akses terhadap perempuan Vietnam melalui *traffickers* menjadi lebih mudah erena daerah perbatasan yang bergunung dan berbukit antara Vietnam dan Tiongkok yang sulit dijangkau oleh badan Keamanan Vietnam (Situmeang, 2020). Kondisi geografis juga memengaruhi preferensi ini. Wilayah perbatasan antara Vietnam dan Tiongkok memiliki topografi yang bergunung, yang membuatnya kurang dijangkau oleh badan keamanan Vietnam. Hal ini memungkinkan *trafficker* atau perekrut yang terlibat dalam perdagangan pengantin untuk beroperasi dengan lebih mudah dan menghindari penegakan hukum. Oleh karena itu, memperoleh perempuan Vietnam melalui *trafficker* menjadi lebih mudah dan kurang berisiko daripada mencoba mendapatkan perempuan dari negara-negara GMS lainnya.

Vietnam sebagai negara destinasi, menurut laporan dari *US Department Of State* menempatkan Vietnam sebagai negara dengan tingkat *bride trafficking* tertinggi se-Asia tenggara sejak 2018 dan berlangsung selama tiga tahun berturut-turut. Fakta ini didukung oleh data yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perdagangan pengantin dari 2017 sebanyak 536 ke 2018 sebanyak 1027 wanita Vietnam yang direkrut, dikirim, dan dijual sebagai pengantin ke berbagai negara, baik di dalam maupun di luar wilayah tersebut pada tahun tersebut (U.S. Department of State, 2021).

Pada tahun yang sama, Vietnam bahkan termasuk ke dalam daftar sepuluh besar negara di seluruh dunia dengan tingkat partisipasi perempuan dalam praktik *bride trafficking* yang signifikan. Secara umum, perempuan Vietnam cenderung lebih sering di jual ke Tiongkok dari pada negara-negara

seperti Korea Selatan, Taiwan, atau negara-negara lain di Asia Tenggara. Menurut *report* yang diterbitkan oleh *Home Office UK* pada tahun 2018, sekitar 70% dari perempuan Vietnam yang terlibat dalam perdagangan pernikahan yang dijual ke Tiongkok untuk dijadikan istri oleh pria di sana (Home Office UK, 2020).

Sebagaimana telah dijelaskan kenaikan signifikan dalam tingkat perdagangan pengantin dari Vietnam ke Tiongkok tentu tidak lepas dari keterkaitannya yang kuat dengan peranan kelompok kriminal terorganisir atau *Transnational Crime Organization* (TCOs) yang beroperasi di Vietnam. Dalam konteks ini, TCOs yang terlibat mencakup entitas seperti *Chinise Triad*, *Vienamese Gangs*, *Liu Yong Group*, dan *Tong* (Khoiriah, 2022). Di mana masing-masing TCOs tersebut memiliki peranan dan fokus aktivitasnya masing-masing.

Perdagangan manusia dalam konteks prostitusi dari Vietnam ke Tiongkok pada akhir 2018 sudah jarang terjadi, tetapi adanya peningkatan perdagangan manusia di mana perempuan Vietnam dibeli atau dipesan oleh laki-laki Tiongkok untuk menjadi pasangan hidup. Tetapi karena perempuan korban *bride trafficking* tersebut dijual ke laki-laki Tiongkok dengan penghasilan rendah, sehingga tenaga mereka juga kerap dieksploitasi.

Sebagian besar kehidupan para perempuan korban *bride trafficking* justru mengalami penderitaan yang serius. Pada dasarnya, kemampuan korban untuk memilih pasangannya tidak lagi terletak dalam kendali mereka

sendiri, melainkan bergantung pada tindakan para *trafficker* dan pria pembeli di Tiongkok. Situasi ini lantas berdampak pada peningkatan kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan yang menjadi korban perdagangan pengantin di dalam rumah tangga (Hung, 2023). Perempuan ini sering kali terjebak dalam pernikahan yang tidak diinginkan dan dipaksa untuk hidup dalam situasi yang merugikan, dengan keterbatasan pada hak-hak mereka dan seringkali menghadapi perlakuan kasar dan eksploitasi dalam rumah tangga yang mereka masuki. Dalam konteks ini, kebebasan dan hak perempuan menjadi terbatas, dan mereka menjadi rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan penindasan.

Tingginya kasus perdagangan manusia yang merupakan bagian dari dinamika perpindahan penduduk, di mana aktivitas migrasi internasional pada dewasa ini dapat dikatakan lebih kompleks dan rentan terhadap peluang terjadinya perdagangan manusia, terkhususnya perempuan. Perempuan seringkali memilih migrasi sebagai cara untuk bertahan hidup dan mencari kehidupan yang lebih baik, namun aktivitas migrasi mereka yang tidak sesuai prosedur yang justru membawa kehidupan mereka lebih menderita. Meninjau hal tersebut, *International Organization for Migration (IOM)* sebagai organisasi internasional yang berfokus pada bidang migrasi internasional juga turut menyoroti isu perdagangan manusia. IOM bergerak sebagai organisasi kemanusiaan yang berkomitmen pada perjuangan hak asasi manusia. Fokus utamanya adalah mengatasi kejahatan perdagangan manusia, yang merupakan masalah strategis dan terkait dengan isu-isu sentral dalam konteks kajian kejahatan lintas batas (IOM, 2010). Dalam melaksanakan programnya, IOM menjalin kerjasama

dengan negara-negara di seluruh dunia untuk melakukan koordinasi bersama pemerintah negara-negara tersebut dalam upaya mencegah perdagangan manusia, termasuk dengan pemerintah Vietnam dan juga Tiongkok.

Kerjasama antara Tiongkok dan *International Organization for Migration* (IOM) memiliki dampak yang signifikan terkait dengan isu *bride trafficking* antara Vietnam dan Tiongkok. Meskipun tidak secara eksplisit membahas terkait *bride trafficking*, namun hal ini berkaitan dengan peningkatan mobilitas penduduk yang mencakup kasus perdagangan manusia seperti *bride trafficking*. Kerjasama Tiongkok dan IOM dalam mengatasi masalah migrasi dan perbatasan mencerminkan keseriusan mereka dalam melawan berbagai bentuk kejahatan lintas batas, termasuk perdagangan manusia (IOM, 2010). Dengan meningkatnya jumlah migran yang masuk dan keluar dari Tiongkok, termasuk perempuan dari Vietnam, ada peluang terjadinya kasus *bride trafficking*.

IOM, dalam kerjasamanya dengan Tiongkok dan Vietnam, juga mendukung upaya pemulangan sukarela dan reintegrasi migran, yang dapat mencakup perempuan yang menjadi korban *bride trafficking*. Keberadaan forum seperti COMMIT (*Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking*) yang turut dikelola oleh IOM juga menunjukkan fokus pada penanggulangan berbagai permasalahan perdagangan manusia, termasuk *bride trafficking*, di wilayah *Greater Mekong Sub-Region* (GMS) terutama di Vietnam.

Tidak hanya itu, IOM menyelenggarakan lokarya untuk membantu memperkuat perlindungan korban perdagangan manusia termasuk *bride*

trafficking. Lokarya ini merupakan bentuk kerjasama antara IOM dengan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, yang mendukung implementasi kebijakan *China's Second National Plan of Action to Combat Trafficking* yang diadopsi oleh Tiongkok terkait pemberantasan perdagangan manusia (2013-2020). Dengan demikian, kerjasama ini secara tidak langsung terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan *bride trafficking* antara Vietnam dan Tiongkok, karena isu ini adalah salah satu konsekuensi negatif dari peningkatan mobilitas penduduk di kawasan Tiongkok dan Vietnam.

Berdasarkan pemaparan diatas terkait *bride trafficking* (perdagangan pengantin) di atas, penulis tertarik untuk mendalami permasalahan *bride trafficking* (perdagangan pengantin) yang diteliti menggunakan metode kualitatif dengan didukung oleh teori *global governance*, teori feminisme, konsep *human trafficking*, konsep *bride trafficking* dan konsep *human security* dengan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai: **“Kontribusi *International Organization for Migration (IOM)* dalam Penyelesaian Isu *Bride Trafficking* (Perdagangan Pengantin) dari Vietnam ke Tiongkok”**

1.2. Perumusan Masalah

Adanya persoalan baru dalam isu *human trafficking* yang dapat berbentuk segala jenis perdagangan manusia seperti perdagangan anak, perdagangan seks, perdagangan buruh, hingga perdagangan perempuan sebagai pengantin pesanan atau dikenal dengan istilah *bride trafficking*. Fenomena *bride trafficking* sangat mengkhawatirkan bagi para perempuan, kebanyakan dari mereka berasal dari latar belakang keluarga berpenghasilan rendah yang

dijanjikan oleh para *trafficker* untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik guna mendapat kehidupan yang layak. Banyak faktor yang menjadi pendorong terjadinya *bride trafficking* yang terjadi di Vietnam dan Tiongkok, salah satunya adalah adanya penerapan kebijakan *one child policy* di Tiongkok yang mengakibatkan ketidaksetaraan *ratio* antara laki-laki dan perempuan. Berkembangnya fenomena *bride trafficking* yang ditimbulkan oleh akibat meningkatnya arus migrasi antarnegara, sehingga IOM sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang migrasi juga memiliki fokus tujuan dalam mengatasi adanya perdagangan manusia yang diakibatkan oleh mobilitas penduduk antarnegara, termasuk isu *bride trafficking* yang kian meningkat di Tiongkok dan Vietnam. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti dalam fokus penelitian ini yaitu :

“Bagaimana kontribusi dan tindakan IOM dalam upaya penanganan *bride trafficking* di Tiongkok dan Vietnam?”

1.3. Pembatasan Masalah

Dikarenakan luasnya cakupan permasalahan mengenai *human trafficking* di Tiongkok dan Vietnam, maka penulis perlu membatasi ruang permasalahan guna membantu penulis dalam mempermudah pembahasan yakni yang mengacu pada peranan atau tindakan *International Organization for Migration* (IOM) dalam menangani permasalahan perdagangan manusia. Tetapi dikarenakan luasnya permasalahan terkait *human trafficking* tekhususnya terhadap perempuan, yang dipengaruhi oleh migrasi yang dipicu oleh beberapa faktor lainnya. Sehingga penulis membatasi ruang permasalahan dalam penelitian ini,

yakni hanya pada isu *bride trafficking* yang dapat dipengaruhi oleh adanya migrasi perempuan dari Vietnam ke Tiongkok, dengan mengambil rentang waktu 2018-2021.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian tentu mesti memiliki tujuan yang jelas dan terarah, untuk memberikan arahan yang diperlukan dalam proses penelitian berlangsung. Adapun tujuan dari penelitian tersebut bertujuan agar peneliti dapat mempertahankan konsistensi dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan adanya identifikasi dan rumusan masalah yang jelas, maka tujuan penelitian dapat didefinisikan dengan baik.

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi serta menganalisis bagaimana peran IOM sebagai sebuah organisasi internasional yang aktif dalam mengelola migrasi dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada para migran yang membutuhkan, terutama perempuan yang terlibat dalam isu perdagangan manusia, khususnya dalam fenomena *bride trafficking* yang dapat pula dipengaruhi oleh perpindahan penduduk antarnegara. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait pentingnya peran organisasi internasional yang bekerja sama erat dengan mitra pemerintah untuk menangani fenomena *human trafficking* terkhususnya *bride trafficking*, yakni IOM yang meskipun bergerak dalam bidang mobilitas penduduk tetapi dapat membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan yang berkenaan dengan kemanusiaan. Dalam hal ini IOM berperan dalam menangani permasalahan *bride trafficking* yang melibatkan perempuan melalui berbagai program yang

dicanangkannya juga dengan forum-forum kerjasama diantar negara-negara yang terlibat, yakni Tiongkok dan Vietnam.

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diantaranya:

- 1) Untuk mengetahui peran dan fungsi *International Organization for Migration* (IOM) terutama dalam permasalahan *human trafficking* secara umum.
- 2) Untuk mengetahui permasalahan *bride trafficking* yang terjadi dari Vietnam ke Tiongkok.
- 3) Untuk mengetahui kontribusi dan tindakan IOM sebagai organisasi migrasi internasional dalam menangani permasalahan *bride trafficking* yang terjadi di Tiongkok dan Vietnam.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya, suatu penelitian memiliki manfaat yang bersifat positif terhadap subjek yang tengah diteliti, dengan harapan dapat memberikan kegunaan dan manfaat baik secara akademis, teoritis, maupun praktis. Beberapa kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara akademis, penelitian ini memiliki relevansi dalam pengembangan Ilmu Hubungan Internasional serta meningkatkan pemahaman peneliti dan juga sebagai salah satu syarat untuk

menempuh ujian sidang sarjana Strata-1 (S1) di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan Bandung.

- 2) Secara perspektif teoritis, penelitian ini memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu hubungan internasional, terutama dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya dalam konteks permasalahan perdagangan perempuan untuk pernikahan paksa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para akademisi di bidang hubungan internasional dan menjadi rujukan awal untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
- 3) Secara praktis, penelitian ini berguna dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu perdagangan manusia, terutama dalam konteks *bride trafficking* di Tiongkok dan Vietnam. Sehingga, penelitian ini dapat berperan dalam memotivasi masyarakat sebagai subjek penelitian untuk mengambil tindakan yang lebih aktif dalam menangani isu ini. Kesadaran publik juga dapat memberikan tekanan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk mengambil langkah yang lebih tegas dalam melindungi hak asasi manusia, terutama perempuan-perempuan yang terlibat dalam migrasi.